

Bali dalam Tarikan Pembangunan Berkelanjutan

I Wayan Suarna
Universitas Udayana
email: suarnawyn@yahoo.com

ABSTRACT

With the enactment of a global agenda known as the Sustainable Development Goals (SDGs), all local governments must mainstream the environment in various government programs and policies. The mainstreaming is carried out because of the increase in anthropogenic activities which are predicted to have an impact on the existence of development and the environment. The Province of Bali has a variety of traditional wisdom that has significantly contributed greatly to environmental services and the provision of environmental services. However, increasing population growth has the potential to reduce environmental quality because of the excessive exploitation of natural resources without taking into account the sustainability of Bali's natural resource functions that have limitations. Related to this, the sensitivity and alignments of the environment that were patterned in the SDGs from various stakeholders need to be improved in an effort to build togetherness to conduct environmental management holistically.

Keywords: global agenda, sustainable development, development, environment, post-Reform.

PENDAHULUAN

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden.

Pengarusutamaan SDGs kedalam berbagai kebijakan pembangunan adalah sangat strategis mengingat lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak seluruh warga negara sesuai dengan amanat pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian menjadi kewajiban seluruh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan

pembangunan dengan selalu mengarusutamakan lingkungan kedalam berbagai aspek kebijakan dan kegiatan sehingga dapat melaksanakan pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.



Sumber: vox.com

Aktivitas antropogenik diprediksi memberikan dampak terhadap eksistensi pembangunan dan lingkungan hidup. Aktivitas tersebut sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Provinsi Bali tertinggi terjadi pada rentang waktu tahun 2000 sampai 2010 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1,90%. Berdasarkan data BPS (2016), jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2015 telah mencapai 4.200.100 jiwa atau rata-rata mengalami pertumbuhan 1,23% per tahun pada rentang waktu 2010-2015,. Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sumberdaya manusia dalam berbagai aspek pembangunan termasuk sosial dan budaya. Kearifan tradisional masyarakat Bali secara nyata telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pelayanan lingkungan dan penyediaan jasa lingkungan. Di lain pihak pertumbuhan penduduk yang meningkat terus disinyalir menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat dari tereksplotasinya sumberdaya alam secara berlebih tanpa memperhitungkan kelestarian fungsi sumberdaya alam tersebut, sementara Bali memiliki keterbatasan terhadap penyediaan sumberdaya alam.

Berdasarkan ilustrasi di atas maka pengelolaan lingkungan hidup di provinsi Bali harus mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berlandaskan kepada falsafah Tri Hita Karana. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah provinsi Bali dalam pengarusutamaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan adalah Bali Green Province. Bali Green Province telah dideklarasikan pada saat pembukaan Konferensi UNEP ke-11 di Nusa Dua pada tanggal 22 Pebruari 2010. Bali Green Province adalah komitmen Pemerintah Propinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, LSM, dan seluruh komponen masyarakat Bali dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkan Bali yang bersih, sehat, nyaman, hijau, lestari, dan indah bagi generasi kini dan yang akan datang.

MEMBUMIKAN “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”

Tujuan dari penancangan program Bali *Green Province* adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, hijau, lestari, dan indah berdasarkan Tri Hita Karana guna mendukung tercapainya Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Pembangunan Daerah Provinsi Bali berlandaskan pada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu dan konsep Tri Hita Karana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan menyeimbangkan tujuan ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Kearifan lokal Tri Hita Karana mengarah pada pencapaian masyarakat Bali yang lebih sejahtera lahir dan batin. Tri Hita Karana sebagai pola kehidupan masyarakat Bali yang dimaknai sebagai tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yaitu *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Aspek *parhyangan* mempunyai makna keterikatan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Bali yang religius. Aspek *pawongan* dimaknai sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam kehidupan yang terorganisir di dalam keluarga, warga, desa pakraman, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi sebagai wadah interaksinya. Aspek *palemahan* dimaknai sebagai hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan.

Daerah Bali yang relatif kecil mempunyai keterbatasan yang nyata pada ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki, akan tetapi di sisi lain memiliki kebudayaan daerah dan jasa-jasa lingkungan alam yang merupakan potensi andalan sebagai sumber pembangunan. Potensi lokal yang sangat khas yang dimiliki Daerah Bali seperti keunikan alam, budaya, termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan

yang senantiasa menopang gerak pembangunan, harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya (Suarna, 2014).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumberdaya alam nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Hal ini mempunyai implikasi bahwa kewenangan daerah terhadap sumberdaya alam yang dimilikinya tidak hanya sebatas pada aspek pemanfaatan saja tetapi meliputi juga aspek eksplorasi, konservasi dan pengendalian pemanfaatannya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang diharapkan memberikan manfaat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Upaya pembangunan ditempuh dengan cara pendayagunaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan. Proses ini akan mempercepat laju eksploitasi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang akhirnya akan mengurangi ketersediaannya dan daya dukung lingkungan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan, bahwa setiap pemanfaatan sumberdaya alam perlu memperhatikan patokan-patokan, bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestariannya terkait dalam ekosistem dan kemungkinan untuk penggunaan dalam pembangunan pada masa yang akan datang



Sesungguhnya program unggulan Bali Green Province merupakan pengejawantahan dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek atau pilar antara lain: ekonomi, sosial,

lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berintegrasi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup (Suarna, 2010).

Pada aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat

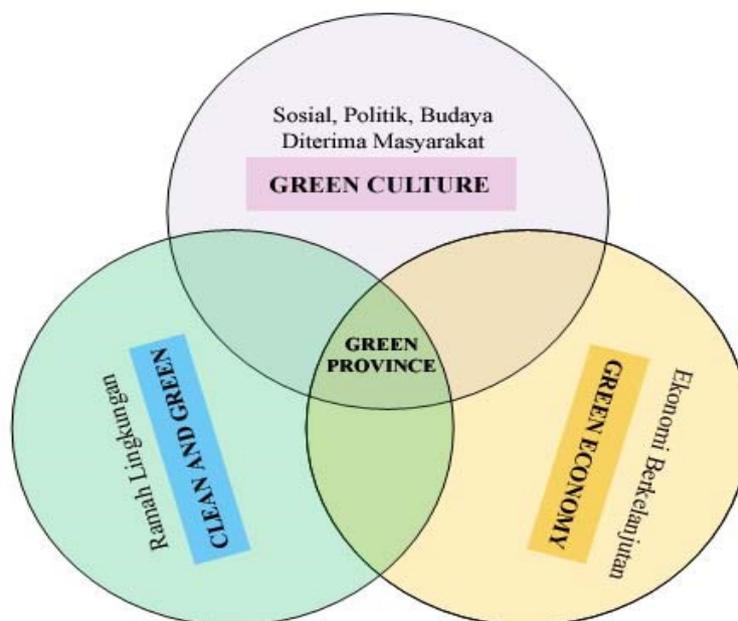
meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan masa depan, sehingga di kemudian hari akan terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi. Dapat diartikan pula keberlanjutan ekonomi sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara berkelanjutan pemerintahan.

Pada aspek sosial pembangunan dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Keberkelanjutan sosial diartikan sebagai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan gender dan akuntabilitas politik.

Aspek Lingkungan mengisyaratkan bahwa faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang merupakan aspek yang banyak disoroti ketika membahas tentang *sustainable design*. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa sebagai contoh yaitu meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan, melindungi modal alam yang kritis atau penting. Keberkelanjutan lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam, dan kelestarian fungsi lingkungan. Ini menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang berbagai media lingkungan dan fungsi ekosistem lainnya, yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

Keterkaitan Bali Green Province sebagai pengejawantahan dari tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar berikut. Green culture adalah salah satu pilar dari Bali Green Province yang memerlukan usaha dan berbagai program untuk mengajak semua masyarakat Bali memiliki budaya yang memiliki keberpihakan terhadap lingkungan. Green culture sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merubah perilaku agar kepedulian terhadap lingkungan semakin nyata dan meningkat. Green Economy adalah pilar kedua dari Bali Green Province. Pilar ini mengisyaratkan bahwa produktivitas ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan jaminan upaya konservasi yang tinggi pula. Semua dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas antropogenik harus dapat dikelola dengan baik sehingga tidak akan

merugikan bagi generasi berikutnya. Clean and Green sebagai pilar ketiga dari Green Province mengharuskan semua komponen masyarakat memiliki kepedulian terhadap upaya hidup bersih dan sehat. Sebagai ilustrasi; sampah yang tidak mungkin tidak ada selama ada aktivitas manusia belum dapat ditangani dengan baik sampai saat ini. Sebagian masyarakat ada yang sudah mampu mengolah sampah dengan baik, mengolah sampah sebagai berkah dan sebagian lagi masih ada yang menganggap sampah adalah masalah. Sebagaimana keseimbangan yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan, maka Bali Green Province juga membutuhkan keseimbangan di antara ketiga pilar baik dalam perencanaan ataupun implementasinya.



Gambar 1. Interseksi antara ketiga pilar pembangunan berkelanjutan dengan Bali Green Province.

DALAM TARIKAN “SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

Pada hakikatnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi atau menghancurkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya (Heriawan, 2009). Untuk itu pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang tidak menghancurkan suatu wilayah. Didalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi pada umumnya akan terjadi proses pemanfaatan sumberdaya alam. Kegiatan sosial-ekonomi inilah yang berkembang secara eksponensial sedangkan sumberdaya alam yang ada dibatasi dengan berbagai keterbatasan.

Ada berbagai suplai yang diberikan alam kepada manusia, yakni di antaranya adalah sumberdaya; *life support*, dan ruang. Namun disisi lain manusia mengembalikannya dalam bentuk: *waste; over exploitation of resources; physical degradasi; landscape modification*. Hubungan antara manusia dan lingkungannya berada dalam suatu proses mencari keseimbangan - di mana bila kapasitas daya dukung lingkungan masih berada jauh di atas kegiatan sosial-ekonomi yang ada, maka secara alamiah lingkungan masih mempunyai kemampuan untuk melakukan proses netralisasi (Clapham, 1973). Dampak yang terjadi akan menjadi lain apabila kegiatan sosial-ekonomi yang ada berada jauh di atas daya dukung lingkungannya.

Didalam memanfaatkan sumberdaya alam Bali memiliki berbagai kearifan local yang mencerminkan kekuatan budaya yang mendasari sikap dan perilaku serta gaya hidup masyarakat (Dalem, *et al.* 2007). Pengenalan dan revitalisasi kearifan lokal merupakan upaya untuk merubah perilaku untuk kembali “eling” dan bersahabat dengan lingkungan. Tak ada yang menyangkal bahwa perilaku manusia dengan aktivitas antropogeniknya telah menimbulkan berbagai degradasi lingkungan dan mengarah kepada munculnya bencana lingkungan. Karenanya, betapapun kecilnya perubahan perilaku harus dilakukan untuk penyelamatan lingkungan. Berbagai kearifan lokal Bali terbukti telah mampu membawa Bali sebagai sebuah pulau dengan adat dan budaya adiluhung sehingga Bali terkenal di berbagai belahan dunia.

Sebagai sebuah ilustrasi dalam dalam program Bali Green Province Pemerintah Provinsi Bali telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK di atmosfer yang dapat dilihat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 bahwa penurunan emisi GRK akan dilakukan sebesar 2% setiap tahun (BLH Bali, 2012). Untuk menjadikan Bali bersih dan hijau (*Clean and Green*) berkelanjutan, Bali harus mampu memiliki langit biru dengan menekan terus emisi gas rumah kaca ke atmosfer atau selalu meningkatkan upaya penyerapan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian Bali harus melakukan kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca dalam berbagai sektor seperti sektor lahan pertanian, sektor kehutanan, sektor industri, sektor transportasi, sektor energi, dan sektor limbah.

Sektor transportasi adalah sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap akumulasi GRK di atmosfer di Provinsi Bali. Terkait dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi GRK ini pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita untuk mengurangi emisi GRK ke atmosfer dari sektor transportasi. Dalam catatan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, berbagai keuntungan telah diperoleh dari keberadaan pelayanan angkutan umum Trans

Sarbagita ini seperti keuntungan sosial-ekonomi, penghematan BBM, dan berkurangnya kemacetan. Keuntungan lain adalah terjadi pengurangan sebesar 421.408 kendaraan yang tidak lagi dipergunakan oleh penumpang Trans Sarbagita tahun 2015. Pengurangan Emisi Gas Buang sebesar 4.160 ppm/hari untuk 2 koridor dan sebesar 35.360 ppm/tahun untuk 17 koridor.

Dalam konteks Bali *Green Province* dan *Sustainable Development* program pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita sangat memberikan keuntungan ekologis menuju Bali *Clean and Green* dan memiliki keberpihakan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pandangan di atas akan tetap bermakna kalau komitmen pemberlakuan pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita masih tetap dianggap sebagai pelayanan publik. Tentu akan sangat berbeda apabila pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita hanya dilihat dari sisi ekonomi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- BLH. 2012. *Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim*. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
- BPS. 2016. *Bali dalam Angka*. Badan Pusat Statistika Provinsi Bali.
- Clapham Jr.,W.B. 1973. *Natural Ecosystems*. Macmillan Pub., New York.
- Dalem, A. A. G. R., I N. Wardi., I W. Suarna., I W. Sandi Adnyana. 2007. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup". UPT Penerbit Universitas Udayana, Denpasar.
- Heriawan, Rusman. 2009. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Indicators of Sustainable Development)*. Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- Suarna, I.W. 2010. "Peta Jalan Menuju Bali Clean and Green". Makalah Seminar Lingkungan Hidup, diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
- Suarna, I W. 2014. *Peternakan yang Menekan Pencemaran*. Arti Fondation. Denpasar.